

MEDIA INDONESIA

PEMERINTAH RAKYAT

HOTLINE

Berlangganan & Customer Service

Telp/Fax: (021) 582-1303

http://www.medindo.co.id/



Temuan TGPF soal Kerusuhan Mei 1998

Prabowo dan Sjafrie Bertanggung Jawab

JAKARTA (Media): Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mendesak pemerintah melakukan penyelidikan terhadap pertemuan di Makostad pada 14 Mei 1998 untuk mengetahui, mengungkap, dan memastikan keterlibatan Letjen TNI Prabowo Subianto dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998 lalu.

Pemintaan itu merupakan salah satu butir rekomendasi TGPF yang dikemukakan Ketua TGPF Marzuki Darusman kemarin di Jakarta ketika mengumumkan hasil akhir TGPF di hadapan wartawan dalam dan luar negeri. Hadir pada pertemuan tersebut hampir semua anggota tim tersebut di antaranya Mayjen PI Marwan Paris, Said Aqiel Siradj, Rosita Noer, Mayjen Pol Da'i Bachtiar, Romo Sandyawan, Abdul Hakim Garuda Nusanantara dan lain-lain. Sebelumnya tim tersebut telah pula menyerahkan hasil sementara kepada pemerintah. Tim tersebut dibentuk pemerintah untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa maupun harta. Berbarengan dengan kasus kerusuhan tersebut menyebar pula kabar mengenai adanya pemerkosaan massal di mana wanita etnis Tionghoa disebut-sebut sebagai korban pemerkosaan.

"Bukan hanya mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo yang terkait dalam peristiwa kerusuhan itu, melainkan mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjaameodin selaku Pangkoops harus juga bertanggung jawab atas peristiwa itu," kata Ketua TGPF Marzuki Darusman.

Dalam laporannya TGPF juga menyebutkan peristiwa kerusuhan tersebut meluas karena kurang memadainya tindakan pengamanan untuk mencegah, membatasi, dan menanggulangi pecahnya rangkaian perbuatan kekerasan yang seharusnya dapat diantisipasi dan diproses secara eskalatif.

"Dapat disimpulkan bahwa adanya kerawanan dan kelemahan operasi keamanan di Jakarta khususnya bertalian erat dengan keseluruhan pengembangan tanggung jawab Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjaameodin yang tidak menjalankan tugasnya bagaimana seharusnya," kata Marzuki mengutip laporan akhir TGPF itu.

Di hadapan ratusan wartawan dalam dan luar negeri, Marzuki mengatakan peristiwa 13-15 Mei tidak berdiri sendiri melainkan ada rentetan peristiwa sebelumnya yang dimulai dari kasus penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa dan yang paling memicu terjadinya kerusuhan adalah pembakaran mahasiswa Universitas Trisakti yang dilakukan aparat keamanan pada 12 Mei 1998.

Karena itu, kata Marzuki, TGPF mendesak agar pemerintah segera menindaklanjuti kasus-kasus yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindakan kekerasan yang memuncak pada kerusuhan 13-15 Mei dengan seadil-adilnya guna menegakkan dibawa hukum.

Pemerintah juga diminta mengumumkan buku putih mengenai peranan dan tanggung jawab serta keterkaitan satu sama lain dari semua pihak yang bertalian dengan kerusuhan tersebut. "Untuk itu pemerintah perlu menyelidiki pertemuan di Makostad 14 Mei lalu," kata Marzuki.

Selain itu pemerintah juga harus memberikan rehabilitasi dan kompensasi bagi semua korban dan keluarga korban kerusuhan. Pemerintah juga perlu memudahkan korban untuk mengurus surat-surat berharga milik korban. Terhadap gedung-gedung yang terbakar, pemerintah harus segera membantu pemba-

ngunan kembali gedung-gedung tersebut terutama sentra-sentra ekonomi dan perdagangan serta fasilitas-fasilitas sosial.

Laporan TGPF itu juga menyebutkan, sebab pokok peristiwa kerusuhan tersebut adalah terjadinya persilangan ganda antara dua proses pokok yakni proses permukiman elite politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan kepemimpinan nasional dan proses pemburuan ekonomi moneter yang cepat. Dalam proses permukiman elite politik tersebut ada pemeran-peran kunci di lapangan saat terjadi kerusuhan.

"Dalam kaitan ini pertemuan di Makostad pada 14 Mei patut diduga dapat mengungkap peranan pelaku dan pola permukiman yang menuju kerusuhan itu," kata Marzuki lagi.

Kerusuhan seksual
Laporan itu juga menyebutkan korban pemerkosaan sebanyak 52 orang, pemerkosaan dengan penganiayaan sebanyak 14 orang, korban penyerangan seksual 10 orang, dan pelecehan seksual empat orang.

Korban-korban tersebut ada yang dideklarasi langsung oleh TGPF, ada yang melalui pemeriksaan medis oleh dokter, penjalaan dari orang tua korban maupun kesaksian para perawat, psikiater dan lain-lain.

Kerusuhan seksual pada peristiwa kerusuhan itu terjadi di dalam rumah, di jalan, dan di tempat usaha. Mayoritas kekerasan seksual terjadi di dalam rumah atau bangunan, dan TGPF menemukan fakta bahwa sebagian besar kasus pemerkosaan adalah gang rape di mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang bersamaan di tempat yang sama. Kebanyakan korban kasus pemerkosaan itu adalah perempuan dari etnis Tionghoa. (Sub/P-1)



Marzuki Darusman

DOK. MEDIA

Kongres Umat Islam Berkaitan dengan SI-MPR

JAKARTA, (Media): Masjid Istiqlal kemarin menjadi saksi berhimpunnya tokoh-tokoh Islam dalam satu forum.

Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid dan tokoh Muhammadiyah Amien Rais tidak hadir. Gus Dur masih dalam perawatan dokter dan Amien Rais baru bisa hadir pada acara kongres di Pondok Gede yang berlangsung selama empat hari.

Dalam *khobah iftitah* (pidato pembukaan), Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ali Yafie mengatakan, "Kongres ini juga ada kaitannya dengan Sidang Istimewa MPR mendatang serta menyangkut persisian umat Islam di beberapa daerah."

Ali Yafie juga mendesak pemerintah agar agenda konstitusional SI-MPR, Pemilu 1999, dan SU MPR diselesaikan dengan cara terhormat dan terbaik. Dia berharap kepada para tokoh yang hadir agar menyelamatkan agenda negara itu dengan cara santun.

Menteri Agama Malik Fadjar membuka kongres. Acara digelar sejak pukul 07.00 WIB telah dipenuhi lebih dari 2.000 undangan. Peserta dari daerah mencapai sekitar 1.500 utusan dari berbagai ormas Islam.

Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Nurcholish Madjid, Yusuf Isha Mahendra, KH Ali Yafie, KH Ilyas Ruchiyat, dan Anwar Harjono. Sejumlah duta besar negara-negara Islam juga hadir. Antara lain dari Arab Saudi, Pakistan, dan Iran. Selain Meng

Malik Fadjar, dua menteri Kabinet Reformasi Pembangunan juga hadir, masing-masing Menko Kesra dan Taskin Prof Hayono Suyono dan Memperta Hj Tuty Alawiyah.

Dalam sambutannya Rois Aam PBNU KH Ilyas Ruchiyat menilai kongres ini bisa dijadikan ajang untuk mendamaikan hati masing-masing agar ukwah islamiyah bisa terjalani.

Sedangkan Rektor Universitas Paramadina Muliya Nurcholish Madjid menilai selama ini umat Islam dalam mengisi kemerdekaan telah terhambat cukup lama. "Mestinya kondisi macam sekarang ini sudah terjadi 53 tahun lalu. Ini semua karena *nation building* yang dibangun Soekarno dan Soeharto tertunda," katanya.

Dia mengingatkan demokrasi memerlukan kedewasaan. "Kalau dihadapi dengan kedewasaan, tidak akan menimbulkan egoistik. Fase kekecewaan dan desintegrasi bisa teratasi. Dan ledakan partisipasi tidak boleh dihalang-halangi."

Sementara itu di tempat terpisah Ketua Presidium Forum Silaturahmi Partai Islam (FS-PI) Deliar Noer mengharapkan kongres bukan sekadar alat legitimasi pemegang kekuasaan. "Saya yang sekali dana dan tenaga yang dikeluarkan kalau hanya untuk itu," katanya menjawab pertanyaan pers di Jakarta kemarin. (SS/Her/Wdh/X-2)

Penyelesaian Utang Swasta tidak Jelas

Debitor Dalam Negeri Sulit Ditemui

JAKARTA (Media): Hingga hari terakhir Konferensi Prakarsa Jakarta, kemarin, penyelesaian utang swasta Indonesia belum juga jelas arahnya. Keluhan debitor dan kreditor merupakan 'pertunjukan' dominan dalam pertemuan dua hari sekitar 1.200 orang yang mewakili kalangan debitor, kreditor serta biro-biro konsultan restrukturisasi. Namun banyak yang setuju jika konferensi itu merupakan langkah awal pekerjaan besar.

Keluhan terhadap debitor dalam negeri datang dari kreditor Jepang, Toru Sumiyoshi. Kepala Perwakilan Jakarta dari Industrial Bank of Japan. Dia mengaku sulit untuk menemui sebagian debitornya. Selain itu dia juga meminta debitor lebih terbuka.

"Debitor Indonesia ada yang sulit untuk ditemui. Bahkan suatu kali saya telepon, mereka tidak membalas. Kalau sudah begitu sulit untuk membawa mereka ke meja perundingan," katanya. Menurut dia, pada dasarnya kreditor siap untuk melakukan pembicaraan satu meja. Namun jika debitor menghindari akan sulit untuk menumbuhkan kepercayaan kreditor.

Dia sendiri tidak keberatan jika pengusaha meminta pengampunan utang. Karena pada prinsipnya mekanisme itu bukan hal baru.

"Tetapi kami membutuhkan keterbukaan soal aset dan liabilitas debitor yang masih belum terungkap," katanya. Jepang merupakan investor terbesar di Indonesia. Dari US\$67 miliar utang luar negeri Indonesia, sekitar US\$23 miliar merupakan dana asal Jepang.

Berkaitan dengan hal itu, beberapa debitor menilai kreditor Jepang terkenal sebagai salah satu yang teralot dalam negosiasi utang. Hal itu wajar saja, karena seperti dikatakan Sumiyoshi, jumlah dana Jepang yang telah tertanam di Indonesia sangat besar. "Selain itu kami juga mengalami masalah dalam perbankan dalam negeri," tegasnya.

Namun Sumiyoshi bisa juga mengambil tindakan tegas. Jika debitor mengaku tidak mampu membayar utang karena sudah miskin, Sumiyoshi bersedia memberi kelonggaran waktu pembayarannya. "Tapi kalau *rescheduling* juga tidak bisa, silakan tutup 'toko' Anda," katanya.

Sementara Tjiptono Darmadi, konsultan Prakarsa Jakarta, tidak menutup mata adanya keluhan kreditor soal kesulitan menemui debitor dan masalah keterbukaan. Tetapi keluhan debitor, lanjut Tjiptono, juga tidak kalah hebatnya. Mereka saat ini mengaku kesulitan un-

tuk mencari uang tunai. Hal lain yang menjadi keluhan debitor berkaitan dengan jangka waktu pembayaran utang. Pasalnya tidak ada yang berani memastikan kelangsungan pembayaran utang.

Untuk restrukturisasi utang dalam negeri urusannya menjadi pelik, kesulitan perbankan saat ini sedang mengunung. Seperti diungkapkan Sekjen Perbanas Gunarni Soeworo, perbankan nasional saat ini sedang berperjuangan dengan masalah akumulasi *non performing loan* (NPL) dan rekapitalisasi perbankan. Praktis perbankan nasional saat ini benar-benar 'kering' dan tidak mungkin memberi ke-luasan bagi debitornya.

Sementara Komite Pengarah Kreditor PT Semen Cibinong Tbk mengumumkan, perseorangan akan mulai membayar sebagai bunga pinjaman sebesar 25% dari tingkat bunga kontrak yang terutang mulai 1 November 1998. Presdir PT Semen Cibinong Hashim Djajobadikusumo mengatakan perseorangan saat ini telah memasuki tahap akhir pembicaraan dengan komite kreditor untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi pinjaman. Diharapkan pembahasan rencana restrukturisasi dapat selesai pada pertengahan Desember 1998. (AR/E-2)

Pengamanan Sepenuhnya Berada di Tangan Pak Polisi

Sidang Istimewa, Apa yang Istimewa?

SIDANG ISTIMEWA (SI) MPR tinggal enam hari lagi. Sarana dan prasarana persidangan sudah disiapkan, termasuk mengantisipasi adanya voting, selain itu *mike* hanya distapkan di meja podium untuk menghindari adanya interupsi. Lalu keistimewanya terletak di mana? Wakil Ketua MPR/Ketua Badan Pekerja MPR Poedjono Pranjoto dalam percakapan dengan Media di Jakarta, kemarin, menjelaskan ada beberapa alternatif voting seperti yang diatur dalam Tata Tertib MPR.

"Mencoba, kata dia, voting MPR diwakilkan kepada juru bicara fraksi. Karena itu *mike* itu menjadi barang terlarang, karena hanya boleh dimainkan oleh juru bicara fraksi. Sedangkan anggota yang mengemukakan kata setuju, Di luar itu, menjadi pendengar yang baik atau menontoni orang bicara di podium.



Karena itu, Poedjono mengatakan, mungkin *mike* tidak perlu disediakan di semua meja pembicara.

Dia menambahkan bahwa pengamanan Sidang Istimewa MPR sepenuhnya berada di tangan Pak Polisi. "Kita tidak akan mempergunakan aparat keamanan," katanya.

semuanya sudah disiapkan Badan Pekerja yang terdiri dari sebuah Rantap (Rancangan Keputusan) menyangkut jadwal persidangan dan 12 buah Rantap (Rancangan Keputusan).

Adapun materi SI yang sudah disiapkan BP MPR adalah Rantap jadwal persidangan, Rantap perubahan dan tambahan peraturan tata tertib MPR, Rantap pencabutan Tap IV/1983 tentang Referen-

yang bersih dan bebas KKN, dan Rantap Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.

Adakah yang istimewa dari SI MPR? Poedjono mengatakan, SI mengandung keistimewaan dalam menetapkan dasar-dasar reformasi. Ia menjelaskan, pemilu hanya bisa dipercepat jika dilakukan perubahan atas Tap Pemilu. Melalui pemilu yang diselenggarakan secara jujur dan adil bisa dibentuk

sebelum dan sesudahnya pihak kepolisian menjadi koordinator 25 SSK aparat keamanan dari berbagai kesatuan ABRI," kata Wakil Ketua MPR Hari Sabarno yang didampingi Poedjono ketika menjelaskan hasil rapat.

Menurut Sabarno, rapat membahas seluruh aspek pengamanan yang meliputi keamanan tempat persidangan, akomodasi yang bertempat di Hotel Mulia dan Hilton juga mengatur secara teknis lalu lintas dan parkir kendaraan di sepanjang tempat sidang.

"Tentunya dari jumlah personel keamanan tersebut masih ditambah dengan bantuan dari pemerintah yang bebas KKN," katanya.

demokratisasi dan reformasi pemerintahan yang bebas KKN." (Sub/P-1)

6 Hari Menjelang SI MPR
10-13 November 1998

zyrex
Computer Systems

Kompas
kami di JACEY
stand Jan. 94

TACTICAL
Specification

Intel® Celeron™ Processors 266 - 333 MHz
Intel® 440 EX AGP Set

32 MB EDO SDRAM DIMMs expandable to 256 MB DRAM
3.2 GB Ultra DMA / 33 HDD

53 Virge PCI Video Adapter with 2 MB memory, expandable to 4 MB
Integrated Yamaha 715E audio Chipset
32 x Speed ATAPI CD ROM

zyrex® P-703 16 Watt Amplified Stereo Speaker + Microphone

zyrex® 14" digital SVGA 0.28 mm monior built-in

Microsoft Windows 98 along with Certificate of Authenticity
3 years limited warranty